

Penguatan Partisipasi Inklusif Penyandang Disabilitas dalam Pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh di Kabupaten Aceh Besar

Bahagia¹, Novita Sari², Anhar Fazri³, Muliawati⁴, Khalisni⁵, Faradilla Fadlia⁶, Annisah Putri⁷, Maghfira Faraidiany⁸, Fadhil⁹, Cut Maya Aprita Sari¹⁰

^{1,2,4 s.d 10}Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

³Huazhong University of Science and Teknologi, Wulan, China

Email Koresponden: bahagia88@usk.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi inklusif penyandang disabilitas dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh di Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya akses, pemahaman, dan ruang partisipasi politik bagi kelompok disabilitas dalam proses perumusan kebijakan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek utama. Kegiatan dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) bekerja sama dengan Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) Aceh, serta melibatkan mitra seperti KIP, Bawaslu, dan stakeholders lainnya. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi masalah, perencanaan partisipatif, pelaksanaan edukasi politik, Focus Group Discussion (FGD), serta refleksi dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak politik dan mekanisme pembaruan undang-undang, serta meningkatnya keberanian dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis kebutuhan riil penyandang disabilitas. Kesimpulannya, pendekatan partisipatif melalui PAR efektif dalam mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif dan responsif di Aceh.

Kata Kunci : Partisipasi Inklusif, Penyandang Disabilitas, Pemilu Aceh, PAR, Kebijakan Publik

Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Dalam konteks demokrasi yang inklusif, seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai subjek aktif dalam perumusan kebijakan publik (Setiawan et al., 2024). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kelompok disabilitas masih menghadapi berbagai



hambatan struktural, kultural, dan regulatif yang membatasi keterlibatan mereka secara optimal dalam sistem demokrasi, khususnya dalam proses pemilihan umum (Widjaja, 2025). Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat (T, 2025). Pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh menjadi momentum strategis untuk memperkuat jaminan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, suara kelompok disabilitas masih belum terakomodasi secara maksimal dalam proses perumusan regulasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya ruang partisipasi yang tersedia, kurangnya aksesibilitas informasi, serta rendahnya tingkat literasi politik di kalangan penyandang disabilitas.

Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Aceh memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup signifikan. Keberadaan mereka tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong partisipasi aktif kelompok disabilitas dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan kelompok disabilitas.

Dalam konteks tersebut, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK) mengambil peran strategis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan partisipasi inklusif penyandang disabilitas.

Kegiatan ini dilaksanakan di Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) Aceh yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar sebagai mitra utama. YPAC Aceh merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang pendidikan, rehabilitasi, dan pengembangan kapasitas individu (Risपालman & Islami, 2019). Kolaborasi dengan YPAC Aceh diharapkan dapat menjadi pintu masuk yang efektif dalam menjangkau komunitas disabilitas secara lebih luas dan terstruktur.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan berbagai mitra strategis lainnya, seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta stakeholders terkait lainnya. Keterlibatan lembaga penyelenggara pemilu ini menjadi sangat penting mengingat mereka memiliki otoritas dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemilu (Astuti et al., 2024). Sinergi antara akademisi, lembaga penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat menghasilkan pendekatan yang komprehensif dalam mendorong partisipasi politik yang inklusif (Ainurrizqi & Sukmana, 2025). Kolaborasi ini juga menjadi bentuk nyata dari pendekatan pentahelix dalam pengembangan kebijakan publik yang partisipatif dan berkelanjutan.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam konteks partisipasi politik tidak hanya berkaitan dengan akses fisik, tetapi juga menyangkut aspek non-fisik seperti stigma sosial, keterbatasan informasi, serta rendahnya representasi dalam forum-forum pengambilan keputusan (Wicaksana et al., 2023). Banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak politik mereka, termasuk mekanisme untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pembaruan undang-undang (Sudirman, 2025). Di sisi lain, masih terdapat kecenderungan dalam proses perumusan kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip inklusivitas, sehingga menghasilkan regulasi yang kurang responsif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas.

Melalui kegiatan pengabdian ini, dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain melalui sosialisasi, edukasi politik, diskusi kelompok terarah (FGD), serta pendampingan partisipatif.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik penyandang disabilitas, memperkuat kapasitas mereka dalam menyampaikan aspirasi, serta membuka ruang dialog antara kelompok disabilitas dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas partisipasi yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya rekomendasi kebijakan yang berbasis pada kebutuhan nyata penyandang disabilitas. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam hal ini, pendekatan partisipatif menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap suara, termasuk dari kelompok rentan, dapat terakomodasi secara optimal.

Penguatan partisipasi inklusif penyandang disabilitas dalam pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Sebagai institusi akademik, FISIP USK memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada keilmuan dan kebutuhan sosial. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penyandang disabilitas, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat sistem demokrasi yang inklusif di Aceh. Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan demokrasi yang lebih adil, setara, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan partisipasi inklusif harus terus didorong sebagai bagian integral dari upaya reformasi sistem politik dan hukum di Aceh.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan PAR dipilih karena menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat sasaran sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Sumardi Efendi et al., 2025). Dalam konteks penguatan partisipasi inklusif penyandang disabilitas dalam pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh, metode ini dinilai tepat karena memberikan ruang yang luas bagi kelompok disabilitas untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman, serta kebutuhan mereka secara langsung dalam proses yang bersifat kolaboratif dan reflektif.

Secara konseptual, PAR merupakan pendekatan yang mengintegrasikan penelitian, aksi, dan partisipasi secara simultan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang nyata melalui keterlibatan aktif komunitas. Dalam kegiatan ini, penyandang disabilitas yang tergabung dalam Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) Aceh di Kabupaten Aceh Besar tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi berperan sebagai mitra yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh.

Pelaksanaan metode PAR dalam kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan (*problem identification*) yang dilakukan melalui observasi awal dan diskusi partisipatif dengan penyandang disabilitas di YPAC Aceh. Pada tahap ini, tim pengabdian dari Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) bersama mitra mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam partisipasi politik, seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, serta minimnya ruang keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan pemilu.

Tahap kedua adalah perencanaan partisipatif (*participatory planning*), di mana seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyandang disabilitas, tim pengabdian, serta mitra seperti KIP dan Bawaslu, bersama-sama merancang

program kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini mencakup penentuan bentuk kegiatan, materi yang akan disampaikan, metode pendekatan, serta strategi pelibatan peserta. Pendekatan partisipatif dalam tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat sasaran.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan aksi (*action implementation*) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi hak politik penyandang disabilitas, edukasi tentang pentingnya partisipasi dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini juga melibatkan pemangku kepentingan, seperti KIP, Bawaslu, dan stakeholders lainnya, guna membuka ruang dialog antara penyandang disabilitas dan lembaga terkait. Melalui forum ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kendala, serta harapan mereka terhadap regulasi pemilu yang lebih inklusif.

Tahap keempat adalah refleksi dan evaluasi (*reflection and evaluation*). Pada tahap ini, dilakukan evaluasi bersama terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Refleksi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh peserta untuk menilai efektivitas kegiatan, mengidentifikasi capaian, serta merumuskan perbaikan ke depan. Hasil refleksi ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai kontribusi dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh.

Tahap terakhir adalah tindak lanjut (*follow-up*), yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dari kegiatan pengabdian. Tindak lanjut dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan terhadap komunitas disabilitas, serta penguatan jejaring dengan lembaga penyelenggara pemilu dan stakeholder lainnya. Selain itu, hasil kegiatan berupa rekomendasi kebijakan juga didokumentasikan dan diseminasi kepada pihak-pihak terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses legislasi.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk

menggambarkan kondisi partisipasi politik penyandang disabilitas serta merumuskan strategi penguatan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman dan perspektif penyandang disabilitas dalam konteks partisipasi politik.

Dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sasaran. Melalui keterlibatan aktif penyandang disabilitas, diharapkan tercipta kesadaran kolektif dan peningkatan kapasitas dalam memperjuangkan hak-hak politik mereka. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh yang responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan

A. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang mengintegrasikan peran akademisi, komunitas disabilitas, serta pemangku kepentingan terkait dalam satu kerangka kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) berperan sebagai fasilitator utama dalam membangun ruang dialog inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas di Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) Aceh di Kabupaten Aceh Besar sebagai subjek utama kegiatan. Strategi ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan seperti edukasi politik berbasis inklusi, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), serta advokasi partisipatif yang melibatkan mitra strategis seperti KIP, Bawaslu, dan stakeholders lainnya. Selain itu, penguatan kapasitas dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang hak politik, mekanisme pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh, serta teknik penyampaian aspirasi yang efektif. Seluruh proses tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis kebutuhan riil penyandang disabilitas, sekaligus mendorong terbentuknya jejaring kolaboratif yang

berkelanjutan guna memastikan keterlibatan aktif kelompok disabilitas dalam sistem demokrasi yang lebih inklusif di Aceh.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) Aceh yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai peserta utama. Kegiatan diawali dengan tahap pembukaan dan pengenalan program oleh tim dari Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (USK), dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi mengenai hak politik penyandang disabilitas serta urgensi keterlibatan mereka dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman yang komprehensif terkait prinsip-prinsip demokrasi inklusif, aksesibilitas dalam pemilu, serta peluang partisipasi dalam proses legislasi daerah. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif dan komunikatif dengan menyesuaikan kebutuhan peserta, sehingga materi dapat dipahami secara optimal oleh seluruh kelompok disabilitas yang hadir.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan peserta, tim pengabdian, serta mitra strategis seperti KIP, Bawaslu, dan stakeholders lainnya. Forum ini menjadi ruang dialog partisipatif bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta aspirasi mereka terkait pelaksanaan pemilu dan kebutuhan akan regulasi yang lebih inklusif. Hasil diskusi kemudian dirumuskan menjadi poin-poin rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh. Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi bersama dan komitmen tindak lanjut dari seluruh pihak yang terlibat untuk terus mendorong penguatan partisipasi politik penyandang disabilitas secara berkelanjutan di Kabupaten Aceh Besar.



Tim Pengabdian FISIK USK sedang memeparkan materi

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Penguatan Partisipasi Inklusif Penyandang Disabilitas dalam Pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh di Kabupaten Aceh Besar” yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) di Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) Aceh menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan keberanian penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak-hak politik mereka. Melalui rangkaian kegiatan edukasi, diskusi partisipatif, dan kolaborasi dengan mitra strategis seperti KIP, Bawaslu, serta stakeholders lainnya, kegiatan ini berhasil membuka ruang dialog yang inklusif serta menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang merefleksikan kebutuhan riil kelompok disabilitas. Dengan demikian, penguatan partisipasi inklusif tidak hanya berkontribusi pada pemberdayaan penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong terwujudnya sistem demokrasi yang lebih adil, setara, dan responsif dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu Aceh.

Ucapan Terimakasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada Yayasan

Pembina Anak Cacat (YPAC) Aceh di Kabupaten Aceh Besar yang telah menjadi mitra utama serta memberikan ruang dan partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih turut diberikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP), Bawaslu, serta seluruh stakeholders yang telah berkontribusi dalam mendukung terselenggaranya kegiatan secara kolaboratif dan partisipatif. Tidak lupa, penghargaan yang tulus disampaikan kepada seluruh peserta, khususnya penyandang disabilitas, atas antusiasme dan keterlibatan aktifnya, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya penguatan partisipasi politik yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Ainurrizqi, A. F., & Sukmana, O. (2025). Partisipasi Politik Masyarakat di Negara Demokrasi: Studi Kasus Pemilu 2024 di Indonesia. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 72–83. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.74>
- Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 528–539. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>
- Rispalman, R., & Islami, I. (2019). Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 491. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4940>
- Setiawan, M. I., Salsabila, T., Hanifa, M. I., & Sinaga, R. M. (2024). Representasi Pemilu bagi Para Penyandang Disabilitas dalam Dinamika Reparasi Politik Indonesia untuk Mendukung Demokrasi di Era Modern. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(4), 258–265. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.965>
- Sudirman, M. P. (2025). Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Kesetaraan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 33–41. <https://doi.org/10.59896/pesolah.v1i1.151>
- Sumardi Efendi, S. H. I., Ramli, M. A., Benni Erick, S. H. I., Dar Kasih, M. S., Fitria Akmal, S., Jamiati, K. N., MI, K., & Yuli Santri Isma, S. (2025). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Pena Cendekia Pustaka.
- T, Z. (2025). Pemilihan Kepala Daerah : Regulasi, Model Komunikasi Dan Pendidikan Politik Di Aceh. *Sadida Islamic Communications and Media Studies*, 5(1), 1–18.
- Wicaksana, A. M., Makhasin, L., & Sobandi, K. R. (2023). Partisipasi Politik

Penyandang Disabilitas dalam Pengaruh Kondisi Fasilitas Umum Disabilitas. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 109–128. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i2.19>

Widjaja, G. (2025). Studi Komparatif Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Berbagai Negara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1281–1290. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.2936>